

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) di Indonesia menyebabkan banyak perubahan yang terjadi pada Standar Akuntansi Keuangan, salah satunya adalah standar mengenai pencatatan aset tetap setelah pengakuan awal. Setelah konvergensi IFRS berlaku penuh di Indonesia pada tahun 2012, entitas dapat memilih antara metode biaya atau metode revaluasi dalam pencatatan aset tetapnya. Metode revaluasi ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode biaya. Kelebihan metode revaluasi ini salah satunya adalah nilai aset dan ekuitas yang tercatat dalam laporan keuangan akan terlihat lebih besar, sehingga rasio utang terhadap total aset atau total ekuitas perusahaan akan semakin rendah dan meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan. Namun, meskipun metode revaluasi ini memiliki kelebihan, pada praktiknya hingga saat ini perusahaan yang menggunakan metode revaluasi masih belum banyak. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan metode biaya karena metode biaya dinilai lebih sederhana dan memiliki beban penyusutan yang lebih kecil. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi entitas dalam memilih kebijakan akuntansinya, apakah akan menggunakan metode revaluasi atau menggunakan metode biaya.

Berdasarkan PSAK 16 paragraf 29, setelah pengakuan awal aset tetap entitas dapat memilih untuk menggunakan metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Apabila entitas memilih menggunakan metode biaya, maka setelah pengakuan awal entitas mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan aset dan akumulasi rugi penurunan nilai aset, sedangkan pada metode revaluasi setelah pengakuan awal entitas mencatat aset tetap sebesar nilai wajar saat revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak

berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (PSAK 16 paragraf 30-31).

Pada metode revaluasi, jika jumlah aset tercatat meningkat setelah revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Apabila jumlah aset tercatat menurun setelah revaluasi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK 16 paragraf 39-40).

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansinya dari metode biaya menjadi metode revaluasi, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif (PSAK 16 paragraf 42a). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansinya dari metode biaya menjadi metode revaluasi. Beberapa diantaranya yang peneliti ketahui berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah *leverage*, likuiditas, arus kas operasi, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, *market to book ratio*, tingkat utang jaminan, akuisisi, *foreign operation*, *share performance*, *quick ratio*, *capital depletion*, dan lain lain.

Watt dan Zimmerman (1986) memperkenalkan teori akuntansi positif yang membantu dalam menjawab dan menjelaskan mengapa individu atau perusahaan melakukan suatu praktek akuntansi tertentu. Melalui penelitiannya, mereka mengemukakan bahwa manajer akan memilih suatu metode akuntansi yang dapat mengurangi kemungkinan terlanggarnya kontrak utang (*debt covenant hypothesis*). Salah satu kebijakan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengurangi potensi terlanggarnya kontrak utang adalah dengan menerapkan metode revaluasi pada pencatatan aset tetap. Rasio *leverage* biasa digunakan dalam perjanjian utang sebagai batas kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2013). Perusahaan dengan tingkat *leverage* dan kemungkinan melanggar

kontrak utang yang tinggi berkemungkinan besar memilih menggunakan metode revaluasi untuk memperkuat kekuatan perusahaan dalam melakukan negosiasi kontrak utang dengan kreditor (Brown et al, 1992). Sebaliknya, bagi perusahaan dengan tingkat *leverage* dan kemungkinan melanggar kontrak utang yang rendah akan lebih memilih untuk tetap menggunakan metode biaya.

Watt dan Zimmerman (1986) selanjutnya mengemukakan *political cost hypothesis*, yaitu perusahaan yang besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan labanya untuk menghindari dari visibilitas politik, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan dan peraturan yang semakin ketat. *Political factor* ini sering diproksikan menggunakan ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar lebih berkemungkinan untuk memilih metode revaluasi daripada perusahaan yang berukuran kecil (Brown et al, 1992). Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil akan tetap menggunakan metode biaya dalam pencatatan aset tetapnya.

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menggunakan metode revaluasi dalam pencatatan aset tetapnya adalah arus kas operasi. Cotter dan Zimmer (1995) pada penelitiannya menyatakan bahwa penilaian kembali aset tetap dapat membantu untuk meyakinkan kreditur mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar utang karena penilaian kembali aset tetap akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada aset perusahaan yang menjadi jaminan dalam kontrak utang. Perusahaan yang sedang mengalami penurunan arus kas operasi lebih berkemungkinan untuk merevaluasi aset tetapnya karena metode revaluasi aset dapat mengembalikan kapasitas pinjaman perusahaan. Sebaliknya, bagi perusahaan yang arus kas operasinya stabil atau mengalami kenaikan, akan lebih memilih untuk tetap menggunakan metode biaya.

Fenomena yang terjadi pada PT. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) dalam media kontan menunjukkan ketidaksesuaian teori hubungan *leverage* dengan pemilihan metode revaluasi. ETWA diketahui memiliki tingkat rasio *debt to equity* (DER) diatas wajar, yakni sebesar 38,08 kali (Puri, 2017). Namun berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit, ETWA diketahui tetap menggunakan metode biaya dalam pencatatan aset tetapnya. Dalam

catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dinyatakan bahwa “aset tetap dicatat dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada”, tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa setelah pengakuan awal aset tetap dicatat sebesar nilai wajar. Artinya, ETWA menggunakan metode biaya dalam pencatatan aset tetap setelah pengakuan awal. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian teori antara hubungan *leverage* dengan pemilihan metode revaluasi yang mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, lebih berkemungkinan untuk menggunakan metode revaluasi dalam pencatatan aset tetapnya.

Tidak semua perusahaan besar berkenan untuk merevaluasi asetnya. Salah satu perusahaan besar yang tak berminat melakukan revaluasi aset adalah PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Dikutip dari media detik, meskipun pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid V menawarkan diskon pajak penghasilan (PPh) atas aset yang akan direvaluasi, PT Semen Indonesia tetap tidak berminat melakukan revaluasi aset dengan alasan masih memiliki kemampuan untuk mendukung pembiayaan perusahaan. Mereka berpendapat dari sisi kebutuhan kredit belum mendesak karena *internal cash* dan pinjaman yang ada masih cukup untuk mendanai proyek yang ada (Sutianto, 2015).

Penurunan arus kas operasi tidak selalu menjadi faktor pendorong perusahaan untuk menggunakan metode revaluasi pada pencatatan aset tetapnya. Dikutip dari media detik, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengalami penurunan arus kas akibat kasus yang dialami salah satu anak perusahaannya yaitu PT Indo Beras Unggul. Kasus ini menyebabkan disitanya stok produk beras sehingga mengganggu arus kas perusahaan karena produk beras tersebut tidak dapat dijual (Sugianto, 2017). Berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit, AISA tercatat mengalami penurunan arus kas operasi dari periode sebelumnya yang sebesar Rp.463.580 menjadi Rp.267.102 (dalam jutaan rupiah). Tetapi, pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dinyatakan bahwa “setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai”, tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa setelah pengakuan awal aset tetap dicatat sebesar nilai wajar. Artinya, AISA menggunakan

metode biaya dalam pencatatan aset tetap setelah pengakuan awal. Penurunan arus kas operasi ini ternyata tidak membuat AISA termotivasi untuk beralih menggunakan metode revaluasi pada kebijakan akuntansi aset tetapnya sehingga menunjukkan ketidaksesuaian teori hubungan arus kas operasi dengan pemilihan metode revaluasi.

Sebelumnya sudah pernah ada penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mendorong entitas untuk menggunakan metode revaluasi, tetapi penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil temuan yang berbeda. Penelitian Aziz (2017) membuktikan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan memilih menggunakan metode revaluasi. Penelitian Iatridis (2012) juga berhasil membuktikan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan model revaluasi. Namun, penelitian Yulistia (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilihan *revaluation model*.

Hasil penelitian Aziz (2017) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan memilih menggunakan metode revaluasi. Sedangkan penelitian Manihuruk (2015) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pilihan metode revaluasi aset tetap. Penyebab ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pilihan metode revaluasi aset tetap adalah karena revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan di ASEAN sifatnya adalah *upward revaluation*, dimana selisih antara nilai buku dengan nilai revaluasi akan mengakibatkan naiknya saldo laba komprehensif perusahaan dan dapat meningkatkan biaya politis. Namun hasil penelitian Yulistia (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilihan *revaluation model*.

Penelitian Aziz (2017) membuktikan bahwa variabel arus kas operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan memilih menggunakan metode revaluasi. Penelitian Barac dan Sodan (2011) juga berhasil membuktikan bahwa variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap pemilihan model revaluasi. Namun hasil penelitian Yulistia (2015) menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilihan *revaluation model*.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Aziz (2017) mengenai analisis faktor-faktor yang mendorong perusahaan merevaluasi aset tetap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 sebagai populasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Adapun alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi adalah karena kegiatan operasi perusahaan manufaktur terutama dalam kegiatan produksi sangat bergantung kepada aset tetapnya sehingga proporsi aset tetap terhadap total asetnya tinggi dan akan memiliki dampak yang signifikan apabila perusahaan tersebut memutuskan untuk menggunakan metode revaluasi. Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan adanya *GAP research*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan arus kas operasi terhadap pemilihan metode revaluasi aset tetap.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut;

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi?
3. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu;

1. Membuktikan secara empiris *leverage* berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi.
2. Membuktikan secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi.

3. Membuktikan secara empiris arus kas operasi berpengaruh terhadap pemilihan metode revaluasi.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat antara lain:

1.4.1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan perbandingan oleh peneliti-peneliti lain di masa mendatang sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian di Indonesia, khususnya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode revaluasi.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor ketika akan membuat keputusan dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan.

- b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi perusahaan di masa mendatang khususnya terkait pemilihan metode biaya atau metode revaluasi dalam penilaian aset tetap setelah pengakuan awal.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan perpajakan.